

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nur Hazizah Umar¹, Dwi Zahara², Zam Zam Khairani³,
Zahra Zeinatha O Sya Simangungsong⁴, Junita Putri Rajana Harahap⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jalan Garu II Nomor 93
Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Gmail Korespondensi : nurhazizahumar@gmail.com , zaharadwi765@gmail.com ,
zamzamkhairani194@gmail.com, zahrazeinathao@gmail.com , junitaputrirajanaharahap@umnaw.ac.id

Menerima: 09/06/2026	Abstrak - Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan ketersediaan, distribusi, dan akses pangan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur terhadap sepuluh jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami kondisi implementasi program ketahanan pangan secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya kendala dalam aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang cenderung kompleks. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program ketahanan pangan, antara lain melalui peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi pertanian dan pengembangan pangan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.	
Diterima: 13/06/2026		
Menerbitkan: 14/06/2026		
Korespondensi*		
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License		
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Kebijakan Publik.		

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek distribusi, akses, serta stabilitas pangan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan sampai pada tingkat individu yang ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau (Vera, 2021). Definisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan pangan secara optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pangan merupakan

kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang cukup besar memiliki peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan utama adalah alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan produksi pangan. Selain itu, distribusi pangan yang belum merata serta fluktuasi harga pangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Sumatera Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh sistem distribusi dan aksesibilitas pangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga mencakup aspek keterjangkauan dan distribusi pangan kepada masyarakat (Wardani et al., 2024). Dengan demikian, upaya mewujudkan ketahanan pangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Dinas ini bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan masyarakat. Program-program tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, implementasi program ketahanan pangan di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga penyuluh pertanian, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana menjadi faktor penghambat dalam implementasi program ketahanan pangan (Hartati et al., 2024).

Selain faktor sumber daya, aspek komunikasi dan sosialisasi juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. Program yang dijalankan seringkali belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program tersebut masih rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Fazry, 2019).

Struktur birokrasi yang kompleks juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Proses administrasi yang panjang dan berbelit dapat memperlambat pelaksanaan program di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor sumber daya dan komunikasi, struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan (Setiawan et al., 2023).

Selain faktor internal, ketahanan pangan di Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Perubahan iklim, misalnya, dapat berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian, sementara fluktuasi harga pangan dapat mempengaruhi daya beli

masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Lebih lanjut, ketahanan pangan juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan. Ketersediaan pangan yang cukup tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses pangan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan (Hasibuan & Ginting, 2025). Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan akses masyarakat terhadap pangan.

Selain itu, kebijakan ketahanan pangan juga tidak terlepas dari aspek politik pangan. Kebijakan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan tersebut (Aryanti, 2023). Dalam konteks Sumatera Utara, diperlukan sinergi antar berbagai pihak serta penguatan inovasi di sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah (Lumbanraja & Fahreza, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketahanan pangan di Sumatera Utara merupakan persoalan yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun akses pangan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program ketahanan pangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas implementasi program ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Konsep ketahanan pangan tidak hanya menekankan pada aspek produksi pangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan, ketahanan pangan menjadi indikator penting yang menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui berbagai kebijakan yang mendukung sektor pertanian, distribusi pangan, dan stabilitas harga pasar. (Lumbanraja & Fahreza, 2023)

Ketahanan pangan memiliki beberapa dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan berkaitan dengan kemampuan daerah dalam memproduksi atau menyediakan pangan yang cukup, sedangkan akses pangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pangan secara fisik maupun ekonomi. Pemanfaatan pangan menekankan pada konsumsi pangan yang bergizi dan aman, sementara stabilitas pangan berhubungan dengan keberlanjutan pasokan pangan dalam jangka panjang. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat maupun daerah. (Aryanti, 2023)

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Implementasi menjadi tahap yang sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks

ketahanan pangan, implementasi kebijakan mencakup pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan produksi, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya, komunikasi, koordinasi, dan komitmen pelaksana kebijakan. (Setiawan, Rusli, & Mayarni, 2023)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah, kelompok tani, organisasi masyarakat, serta sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya implementasi yang efektif, kebijakan ketahanan pangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Vera, 2021)

2.3 Peran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura. Instansi ini berperan dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan diversifikasi pangan, serta memperkuat sistem distribusi pangan di daerah. Melalui berbagai program yang dijalankan, dinas berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. (Hasibuan & Ginting, 2025)

Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, dinas juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Pengelolaan program yang efektif membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sistem koordinasi yang baik, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. (Pohan & Harahap, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi program ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, artikel penelitian, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan implementasi kebijakan publik. Referensi yang digunakan berjumlah sepuluh jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian sehingga mampu mendukung analisis secara mendalam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk menghubungkan temuan-temuan dari berbagai literatur dengan kondisi implementasi program ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan beserta faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilannya, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan dan pengembangan kebijakan ketahanan pangan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana produksi, hingga pembinaan dan penyuluhan kepada petani. Program tersebut dirancang untuk mendukung sistem ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Namun, jika dilihat dari berbagai hasil kajian penelitian sebelumnya, implementasi program ketahanan pangan di tingkat daerah pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala yang membuat hasilnya belum optimal (Saptarahmawati et al., 2024).

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, upaya peningkatan produksi memang terus dilakukan melalui berbagai program seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Akan tetapi, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya stabil. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Selain itu, produktivitas pertanian juga masih dipengaruhi oleh faktor teknis seperti penggunaan teknologi yang belum merata serta keterbatasan pengetahuan petani dalam mengelola usaha tani. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi belum cukup kuat untuk menjamin ketahanan pangan apabila tidak didukung oleh faktor lainnya.

Permasalahan distribusi pangan juga masih menjadi tantangan yang cukup nyata. Dalam beberapa kondisi, pangan sebenarnya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun tidak semua wilayah dapat mengaksesnya dengan mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem distribusi pangan belum berjalan secara merata. Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh bagaimana pangan dapat didistribusikan secara efektif dan merata kepada masyarakat (Wardani et al., 2024). Dengan demikian, distribusi menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Selain distribusi, persoalan akses pangan juga menjadi perhatian utama. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Akibatnya, meskipun pangan tersedia, masih terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan untuk mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Akses terhadap pangan menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting dibandingkan dengan ketersediaan pangan itu sendiri (Hasibuan & Ginting, 2025).

Dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan di Sumatera Utara. Faktor pertama adalah komunikasi. Dalam praktiknya, penyampaian informasi mengenai program belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari program yang dijalankan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa komunikasi yang kurang efektif dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan (Fazry, 2019).

Faktor kedua adalah sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga penyuluh pertanian, menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran menjadi faktor penghambat dalam implementasi program

ketahanan pangan (Hartati et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

Faktor ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Sikap dan komitmen pelaksana memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan program. Dalam beberapa kondisi, kurangnya koordinasi dan kerja sama antar pelaksana menyebabkan program tidak berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor teknis, faktor sikap dan komitmen juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang panjang dan berjenjang seringkali memperlambat pelaksanaan program. Banyaknya tahapan administrasi yang harus dilalui menyebabkan program tidak dapat segera dijalankan di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan (Setiawan et al., 2023).

Selain faktor-faktor tersebut, aspek kelembagaan juga memiliki peran penting dalam implementasi program ketahanan pangan. Kelembagaan yang kuat akan mampu mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan program berjalan tidak sinkron dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Di sisi lain, ketahanan pangan juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pangan. Kebijakan pangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi maupun politik. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa adanya konflik kepentingan dan ketidaksinkronan regulasi dapat menghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan (Aryanti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan tidak sepenuhnya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kepentingan yang ada.

Dalam konteks Sumatera Utara, upaya meningkatkan ketahanan pangan juga memerlukan sinergi antar berbagai pihak. Penguatan kerja sama antar lembaga serta pemanfaatan inovasi dalam sektor pertanian menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Selain itu, pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal juga menjadi strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah (Lumbanraja & Fahreza, 2023).

Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketahanan pangan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, sehingga berdampak pada ketersediaan pangan. Di sisi lain, fluktuasi harga pangan juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi program ketahanan pangan di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas implementasi program ketahanan pangan. Peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi program menjadi langkah awal yang penting agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam program yang dijalankan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga penyuluh, juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi hal yang penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Di samping itu, penyederhanaan struktur birokrasi dapat membantu mempercepat pelaksanaan program. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian serta pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan (Pohan & Harahap, 2024).

Secara keseluruhan, implementasi program ketahanan pangan di Sumatera Utara masih memerlukan berbagai perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan yang digunakan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek distribusi, akses, serta penguatan kelembagaan dan kebijakan yang mendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui berbagai program yang mencakup peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai kendala dalam setiap aspek ketahanan pangan.

Dari sisi ketersediaan, peningkatan produksi belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dari sisi distribusi, penyaluran pangan belum merata, sehingga masih terdapat kesenjangan antar wilayah. Sementara itu, dari sisi akses, kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jika ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program, yaitu komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang masih cukup kompleks. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, serta dinamika kebijakan juga turut mempengaruhi keberhasilan program.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan ketahanan pangan di Sumatera Utara tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga melibatkan aspek distribusi, akses, kelembagaan, dan kebijakan. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas komunikasi, penguatan sumber daya manusia, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta penyederhanaan birokrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian dan pengembangan potensi pangan lokal juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi program ketahanan pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai aspek tersebut secara seimbang dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara atas kontribusi dan informasi yang mendukung kajian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan-rekan, serta semua pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, V. (2023). Ekonomi Politik Program Nasional Kedaulatan Pangan: Studi Kasus Anomali Implementasi Kebijakan Swasembada Beras (2014-2020). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2334. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2297>
- Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358-375.

- <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3104/pdf>
- Hartati, S., Yahya, M. R., & Sutrisno. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM. 7(1), 107–119.
- Hasibuan, A. Z., & Ginting, W. O. (2025). Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kepala Rumah Tangga Perempuan Di Kecamatan Medan Helvetia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 299–312. <https://doi.org/10.69714/560vx622>
- Lumbanraja, V., & Fahreza, I. (2023). *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan Politik Pangan : Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara*. 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.13354>
- Pohan, M. K. C., & Harahap, M. I. (2024). Peran Pengawasan Fungsional Oleh Pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Di Dinas Ketahanan Pangan , Tanaman Pangan Dan Hortikultura UPT. *Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara*. 2(2).
- Saptarahmawati, Nurman, & Suri, D. M. (2024). PUBLIKA : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau*. 10(2), 256–274. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.19127>
- Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni. (2023). Implementasi program ketahanan pangan.
- Vera, N. (2021). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 23–31.
- Wardani, A., Simanjuntak, E. R., Siregar, I. M., Marbun, S., & Rosni. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA MEDAN. 393–403.

